

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan pustaka

Kajian pustaka, karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan mendukung penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Nida Hanifah, *Strategi dan Efektivitas Program Jamaah Mandiri Masjid Jogokariyan Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini meneliti mengenai Manajemen, Strategi, dan Keefektifan program jamaah mandiri di Masjid Jogokariyan sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan program ini sudah efektif dalam memperdayakan ekonomi masyarakat. Karena berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Benny Saputra, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid*, 2016, skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini meneliti manajemen pengelolaan keuangan, strategi dan pengaruh program di Masjid Jogokariyan dan Syuhada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah perlu adanya wadah (*baitul maal*) sebagai pengelola dana yang masuk. Supaya penyalurannya bisa ke dalam bentuk produktif tidak hanya konsumtif.

3. Ahmad Supriyadi, *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi kritis pasal 53, 54, dan 55 PP. No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Jurnal, Vol. 03 No. 02, April 2017. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pasal 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sudah efektif dan berdampak positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi angka kemiskinan.
4. Ika Silviana, *Masjid dan Ambivalensi Demokrasi (Studi Krisis Pada Masjid Jogokariyan Mantrijeron, Yogyakarta)*, Jurnal, vol. 1 No. 2, Desember 2016, STAIN Kediri. Penelitian ini meneliti tentang kegiatan yang ada di Masjid Jogokariyan dan posisi masyarakat sebagai pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini Masjid Jogokariyan telah menjadi tempat ruang public bagi permasalahan sosial masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Takmir masjid.
5. Asep Suryanto dan Asep Saepulloh, *Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*, Jurnal, Vol. 8 No. 2, Oktober 2016, Universitas Siliwangi. Penelitian ini meneliti tentang desain model pemberdayaan ekonomi masjid berdasarkan potensi yang dimiliki masjid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan model terintegrasi antara lembaga

ZIS, keuangan mikro, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi yang dimiliki masjid.

6. Siti Aisyah, *Membangun Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang)*, jurnal, Vol. II No. 11, Oktober 2016, UNISI Tambilahan. Penelitian ini meneliti tentang pengkajian mendalam tentang kekuatan ekonomi masjid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masjid Taqwa Muhammadiyah sudah menggerakkan perekonomiannya, tetapi masih didominasi oleh organisasi. Hal ini yang menjadikan masjid belum mampu secara mandiri mengerakan potensi ekonomi untuk memberdayakan masjid itu sendiri.
7. Sukarno L. H, *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal, Vol. 14 No. 2, September 2016, STAI Miftahul Ula Kertosono Nganjuk. Penelitian ini meneliti tentang manajemen dan strategi masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masjid harus dikembalikan seperti fungsinya dibidang ekonomi, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja.
8. Sochimim, *Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal, Vol. 4 No. 4, Januari-Juni 2016, IAIN Purwokerto. Penelitian ini meneliti tentang manajemen dan dampak pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang maskimal akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui program-programnya.

9. Muhammad M. Alwi, *Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, jurnal, Vol. 2 No. 1, Oktober 2015, IAIN Jember. Penelitian ini meneliti tentang optimalisasi dan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masjid selama ini hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja belum berfungsi sebagai sosial-ekonomi seperti zaman Rasulullah.
10. Husniah Suryani, *Peran Masjid Sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat (Penelitian Deskriptif pada PKL Dikawasan Masjid Al-Akbar Surabaya)*, jurnal, Vol. 2 No. 5, Mei 2015, Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini meneliti tentang peran masjid sebagai pemberdaya ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masjid ini sudah berperan sebagai penggerak perekonomian. Masjid menyediakan tempat untuk PKL berjualan di sekita masjid sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
11. Robiatul Auliyah, *Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan*, jurnal, Vol. 8 No. 1, April 2014, Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini meneliti tentang peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan oleh masjid masih skala kecil karena dalam pemberian modal maksimal masjid memberikan pinjaman hanya Rp 300.000. karena sdm

pengurus yang sangat minim mengakibatkan tidak adanya pendampingan dalam pengembalian pinjaman modal.

12. Kamaruddin, *Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh*, jurnal, Vol 13 No. 1, Agustus 2013, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini meneliti tentang analisis pemberdayaan ekonomi menggunakan SWOT dan menyusun strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian masjid di Banda Aceh mempunyai potensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat sekitar dengan potensi yang dimiliki antara lain: potensi SDM, lembaga dan jaringan, iklim lingkungan usaha, dan stakeholder.
13. Seviawati Polinggapo, *Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)*, jurnal, Desember 2014, UIN Maliki Malang. Penelitian ini meneliti tentang pengukuran kinerja Yayasan menggunakan perspektif balanced scorecard. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil skor 94 untuk keempat perspektif. Hal ini menunjukkan sudah sangat baik untuk keseluruhan aspek namun harus ditingkatkan lagi dan perlu ada yang dievaluasi demi mencapai skor maksimal.
14. Jidanah Darmiyati, *Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Metode Pengukuran Kinerja Pada RS IPHI Pedan kabupaten Klaten*, skripsi, 2014, Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini untuk mengetahui kinerja

rumah sakit di klaten dengan 4 perspektif balanced scorecard. Hasilnya menunjukkan kinerja yang baik dilihat dari 4 perspektif.

15. Ari Kristin, *Pendekatan Balanced Scorecard Pada lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jateng*, jurnal Vol VI, Mei 2015. Penelitian ini meneliti perkembangan pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan alat ukur perspektif *balanced scorecard*, hasilnya pengelolaan zakat belum cukup baik, sdm yang dimiliki sangat minim dan berakibat kepada aspek keuangan. Tetapi untuk penyaluran dana zakat dirasa sudah cukup baik karena penyaluran tidak hanya untuk konsumtif tetapi disalurkan ke sector produktif.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	Nida Hanifah (2017) Strategi dan Efektivitas Program Jamaah Mandiri Masjid Jogokariyan Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan program ini sudah efektif dalam memperdayakan ekonomi masyarakat. Karena berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	(Perbedaan): perbedaan penelitian yaitu mengenai manajemen, strategi, analisis swot dan menekankan tentang keefektifan program jamaah mandiri sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Persamaan): persamaan penelitian ini berhubungan dengan tema yang diteliti pemberdayaan ekonomi, dan studi kasus masjid jogokariyan dan metode kualitatif.
2.	Riza Ratnasari (2017) Pemberdayaan Ekonomi	Program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid berpengaruh	(Perbedaan): perbedaan analisis manajemen, program, jumlah responden yang dijadikan sampel, dan analisis pengaruh

	Berbasis Masjid (studi kasus: Masjid Jogokariyan Yogyakarta)	terhadap kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar terbukti dengan peningkatan pendapatan sebelum mendapatkan manfaat dari program.	pemberdayaan dengan kesejahteraan jamaah dan masyarakat. (Persamaan): persamaan penelitian berkaitan dengan tema pemberdayaan berbasis masjid dan studi di Masjid Jogokariyan, dan metode kualitatif
3.	Beny Saputra (2016) Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid	Hasil penelitian adalah perlu adanya wadah (<i>baitul maal</i>) sebagai pengelola dana yang masuk. Supaya penyalurannya bisa ke dalam bentuk produktif tidak hanya konsumtif	(Perbedaan): perbedaan studi kasus di dua masjid, Masjid Jogokariyan dan Syuhada, perbandingan analisis strategi manajemen masjid dalam pemberdayaan ekonomi meliputi kepengurusan, manajemen sdm, manajemen keuangan, potensi yang dimiliki dan manajemen dakwah yang dilakukan kedua masjid ini. (Persamaan): persamaan penelitian tema pemberdayaan ekonomi,

			studi kasus di Masjid Jogokariyan dan metode kualitatif
4.	Ahmad Supriyadi (2017) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi kritis pasal 53, 54, dan 55 PP. No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sudah efektif dan berdampak positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi angka kemiskinan.	(Perbedaan): perbedaan focus penelitian pelaksanaan pasal 53, 54, dan 55 tentang pengelolaan zakat. Studi kasus yang dilakukan. Analisis pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. (Persamaan): persamaan penelitian tema pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan mengelola dana zakat, metode kualitatif
5.	Ika Silviana (2016) Masjid	Hasil penelitian ini Masjid Jogokariyan	(Perbedaan): perbedaan focus tema peran masjid sebagai ruang public

	<p>dan Ambivalensi Demokrasi (Studi Krisis Pada Masjid Jogokariyan Mantrijeron, Yogyakarta)</p>	<p>telah menjadi tempat ruang public bagi permasalahan sosial masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Takmir masjid</p>	<p>untuk permasalahan sosial masyarakat. Analisis kegiatan yang ada di masjid dan peran masyarakat sebagai pelaksananya. (Persamaan): persamaan studi kasus di Masjid Jogokariyan, metode kualitatif.</p>
6.	<p>Asep Suryanto dan Asep Saepulloh (2016) Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan model terintegrasi antara lembaga ZIS, keuangan mikro, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi yang dimiliki masjid.</p>	<p>(Perbedaan): perbedaan analisis fungsi dan potensi masjid seperti analisis potensi lembaga ZIS, keuangan mikro sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, studi kasus di kota Tasikmalaya. (Persamaan): yaitu analisis pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Metode kualitatif</p>

	di Kota Tasikmalaya		
7.	Siti Aisyah (2016) Membangun Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang)	Hasil penelitian ini menunjukkan masjid Taqwa Muhammadiyah sudah menggerakkan perekonomiannya, tetapi masih didominasi oleh organisasi. Hal ini yang menjadikan masjid belum mampu secara mandiri mengerakan potensi ekonomi untuk memberdayakan masjid itu sendiri.	(Perbedaan): perbedaan analisis mendalam kekuatan ekonomi masjid, analisis factor pendukung dan kendala, studi kasus di Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang. (Persamaan): persamaan tema pemberdayaan ekonomi masjid, metode kualitatif.
8.	Sukarno L. H (2016) Strategi	Hasil penelitian ini menunjukkan masjid	(Perbedaan): perbedaan focus pembahasan tentang strategi dan

	Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	harus dikembalikan seperti fungsinya dibidang ekonomi, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja.	manajemen masjid dalam pemberdayaan, studi kasus di Nganjuk. (Persamaan): persamaan tema yang diambil pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, metode kualitatif.
9.	Sochimim (2016) Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang maskimal akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui program-programnya.	(Perbedaan): perbedaan analisis strategi, manajemen, manajemen keuangan, program-program dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Studi kasus di Purwokerto. (Persamaan): persamaan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, metode kualitatif.
10.	Muhammad M. Alwi (2015) Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan masjid selama ini hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja	(Perbedaan): perbedaan penelitian tentang analisis potensi masjid untuk pemberdayaan ekonomi dan analisis swot, dan studi kasus di Jember.

	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	belum berfungsi sebagai sosial- ekonomi seperti zaman Rasulullah	(Persamaan): sama tema pemberdayaan ekonomi, metode kualitatif.
11.	Husniah Suryani (2015) Peran Masjid Sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat (Penelitian Deskriptis pada PKL Dikawasan Masjid Al- Akbar Surabaya)	Hasil penelitian ini menunjukkan masjid ini sudah berperan sebagai penggerak perekonomian. Masjid menyediakan tempat untuk PKL berjualan di sekita masjid sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.	(Perbedaan): perbedaan penelitian ini analisis potensi masjid sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat, dan studi kasus di Surabaya. (Persamaan): persamaan tema pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, dan metode kualitatif.
12.	Robiatul Auliyah (2014) Studi Fenomenologi	Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan oleh masjid	(Perbedaan): perbedaan analisis manajemen masjid dalam pemberdayaan ekonomi, dan pengaruh terhadap kesejahteraan

	Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan	masih skala kecil karena dalam pemberian modal maksimal masjid memberikan pinjaman hanya Rp 300.000. karena sdm pengurus yang sangat minim mengakibatkan tidak adanya pendampingan dalam pengembalian pinjaman modal.	masyarakat, dan analisis factor pendukung dan kendala. (Persamaan): persamaan tema pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, metode kualitatif.
13.	Kamaruddin (2013) Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid	Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai masjid di Banda Aceh mempunyai potensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menyejahterakan	(Perbedaan): perbedaan analisis potensi masjid dalam pemberdayaan ekonomi, analisis manajemen, strategi, analisis swot, potensi sdm, lembaga, jaringan dan studi kasus di Aceh.

	Di Kota Banda Aceh	masyarakat sekitar dengan potensi yang dimiliki antara lain: potensi SDM, lembaga dan jaringan, iklim lingkungan usaha, dan stakeholder.	(Persamaan):persamaan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, metode kualitatif
14.	Seviawati Polinggapo (2014) Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Dengan Menggunakan Metode Balanced	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil skor 94 untuk keempat perspektif. Hal ini menunjukkan sudah sangat baik untuk keseluruhan aspek namun harus ditingkatkan lagi dan perlu ada yang dievaluasi demi mencapai skor maksimal.	(Perbedaan): perbedaan hanya studi kasus lembaga pengelolaan ZIS di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. (Persamaan): persamaan penelitian menggunakan metode <i>balanced scorecard</i> sebagai alat ukur kinerja dengan 4 perspektif. Lembaga pengelolaan dana ZIS.

	Scorecard (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al- Falah Malang)		
15.	Jidanah Darmiyati (2014) Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Metode Pengukuran Kinerja Pada RS IPHI Pedan kabupaten Klaten	Penelitian ini untuk mengetahui kinerja rumah sakit di klaten dengan 4 perspektif balanced scorecard. Hasilnya menunjukkan kinerja yang baik dilihat dari 4 perspektif	(Perbedaan): perbedaan tema yang diteliti yaitu kinerja dan studi kasus Rumah Sakit IPHI Klaten. (Persamaan): persamaan pengukuran kinerja menggunakan metode <i>balanced scorecard</i> sebagai alatnya dengan 4 perspektif. Metode kualitatif.
16.	Ari Kristin (2015) Pendekatan Balanced	hasilnya pengelolaan zakat belum cukup baik, sdm yang dimiliki sangat minim dan	(Perbedaan): perbedaan studi kasus di Masjid Agung Jateng. (Persamaan): persamaan tema pengukuran kinerja menggunakan

Scorecard Pada lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jateng	berakibat kepada aspek keuangan. Tetapi untuk penyaluran dana zakat dirasa sudah cukup baik karena penyaluran tidak hanya untuk konsumtif tetapi disalurkan ke sector produktif	metode <i>balanced scorecard</i> sebagai alat ukur berkaitan dengan perkembangan dan pendistribusian pengelolaan zakat, dan metode kualitatif.
--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Definisi masjid

Masjid adalah tempat berkumpul umat Islam untuk ibadah, bermusyawarah, menebar syiar-syiar Islam atau dakwah dan tempat untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Nama lain dari masjid yaitu rumah Allah atau *baitullah*. Dalam kegiatan sehari-hari, masjid memiliki pengertian yang terbatas yaitu sebagai tempat untuk shalat saja. Hal tersebut sepenuhnya mengikat pada kata masjid itu sendiri yang berasal dari bahasa arab yaitu *ismul-makan*, artinya bahwa kata benda yang menunjukkan tempat. Secara harfiah berarti tempat sujud. Dalam Al-Qur'an kata masjid diulang sebanyak 28 kali (Ahmad, 2014: 14).

Secara etimologi masjid berasal dari bahasa arab yaitu *sajada-yasjudu-sujud-masjid* yang berarti taat, pauh, tunduk, dengan penuh hormat dan takzim atau tempat sujud (Ahmad, 2014: 14). Artinya bahwa masjid merupakan tempat sujud untuk menyembah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan semesta alam. Masjid sebagai symbol umat Islam dan juga sebagai segala kegiatan umat, atau tempat berkumpul dan bersilaturahmi antar jamaah masjid. Jika sujud merupakan moment paling dekat antara hamba dengan Allah, maka masjid secara bahasa dapat pula diartikan sebagai tempat seorang hamba untuk mendekati diri kepada Allah *Ta'ala* (Abdul, 2010: 100).

Sedangkan secara terminologis, masjid berarti sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dimasjid terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan dalam bentuk ibadah atau spiritual, seperti

shalat fardhu, dan kebajikan dalam bentuk amaliyah atau sosialitas sebagai tempat untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah (Sochimim, 2016: 123). Menurut Al-Qadhi Iyadh menyatakan “bahwa masjid adalah tempat di muka bumi yang memungkinkan untuk menyembah dan bersujud kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*” (Asep, 2016: 5).

2. Fungsi dan peran masjid

Masjid sebagai tempat ibadah dan tempat dakwah menebarkan nilai-nilai Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan perdamaian dan kebebasan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan dan khususnya bagi umat Muslim. Oleh karena itu, peran masjid perlu untuk diposisikan sesuai dengan fungsi masjid yang sebenarnya yaitu seperti pada masa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* membangun masjid sebagai langkah awal untuk membangun masyarakat madani, konsep masjid tidak lagi hanya sebagai tempat shalat fardhu saja, akan tetapi masjid juga merupakan pusat pemberdayaan dan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat (Abdul, 2010: 2).

Saat ini fungsi masjid sudah mulai berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan gerakan-gerakan baru dari umat Muslim untuk lebih mengoptimalkan fungsi masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai pusat muamalah seperti pada masa Rasulullah dan sahabat (Sofyan, 1993: 10).

Adapun fungsi masjid yang pertama adalah sebagai *Baitullah* (rumah Allah) yakni sebagai tempat ibadah, tempat untuk bermunajat pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tempat untuk syiar-syiar nilai keislaman. Kedua, selain untuk ibadah, fungsi masjid yaitu *Baitul Ta'lim* (tempat pendidikan), bersosialisasi, bermusyawarah, dan sebagai Baitul Maal (tempat atau sarana kegiatan social-ekonomi) terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid (Muhammad, 2015: 139).

Dengan demikian, masjid harus dikelola dengan baik sehingga asset-aset dan potensi yang dimiliki oleh masjid dapat berdampak luas dan bermanfaat kepada jamaah dan masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ibadah dan muamalah. Sehingga Islam yang kita yakini sebagai agama tertinggi dan *rahmatan lil 'alamin* dapat terwujud dalam realitas sosial-ekonomi melalui pengembangan fungsi dan peran masjid (Sofyan, 1993: 11).

3. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah salah satu cara masyarakat agar dapat menguasai (berkuasa atas) keadaan hidupnya. Craig dan Mayo berpendapat bahwa *empowerment* (pemberdayaan) merupakan pengembangan masyarakat yaitu terkait dengan konsep kemandirian (self

help), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*) (Asep, 2016: 9). Pemberdayaan juga berarti adalah suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah atau masyarakat miskin agar dapat berlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain pemberdayaan adalah suatu cara untuk mengembangkan dan membentuk masyarakat yang mandiri (Nida, 2017: 21).

Menurut Kusnadi (2006) bahwa filosofi pemberdayaan pada masyarakat dapat *dieksplorasi* melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat hubungan antara (1) manusia dan Allah Yang Maha Kuasa (2) manusia dengan manusia (3) manusia dengan alam (Asep, 2016: 10) sedangkan menurut Jim Life pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mereka dapat menemukan masa depan mereka yang lebih baik. Menurut Gunawan Sumohadinigrat pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki *dhu'afa* dengan mendorong, memberikan motivasi, dan kesadaran, tentang potensi yang dimiliki mereka, serta berupaya untuk mengembangkannya (Sochimim, 2016: 131).

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*), (2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh

masyarakat (*Empowering*), (3) memberikan perlindungan (*Protecting*) kepada masyarakat (Nida, 2017: 20).

Sedangkan ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah tangga dan aturan, atau mengatur rumah tangga. Para pakar ekonomi mendefinisikan bahwa ekonomi merupakan suatu usaha untuk mengatur dan mendapatkan harta baik itu berupa material maupun non-material dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari baik secara individu atau kelompok (Idri, 2015: 1).

4. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan khususnya pemberdayaan ekonomi yang berbasis keislaman secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa harus adanya lembaga yang mampu menaungi pemberdayaan ekonomi tersebut berdasarkan pada asas-asas tauhid maupun sosial yang dipandang dapat mempersatukan kedua asas tersebut, salah satu asas tauhid dan asas sosial adalah lembaga masjid (Husniah, 2015: 391)

Masjid dan ekonomi adalah satu kesatuan, pada hakikatnya fungsi masjid tidaklah sebatas tempat peribadatan saja, akan tetapi masjid juga sebagai tempat pemberdayaan dan tempat bertemunya umat muslim. Dalam sejarah Islam, masjid merupakan tempat yang paling produktif. Masjid

memiliki peran yang sangat dalam system perekonomian atau biasanya disebut dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid (Auliyah, 2014: 8).

Paling tidak di zaman modern ini takmir atau pengurus masjid harus melakukan beberapa hal salah satunya adalah masjid sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar masjid (Siti, 2003: 52).

5. Zakat, infak, dan shodaqoh

Zakat, infak, shodaqoh atau biasa disingkat dengan ZIS merupakan instrument dana yang digunakan untuk memberdaya ekonomi masyarakat, dengan pengelolaann ZIS yang profesional dan maksimal akan berdampak kepada pertumbuhan dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai zakat, infak, dan shodaqoh diantara lain:

a. Zakat

Secara *etimolgi* zakat berasal dari kata az-zakah yang bermakna tumbuh, berkembang, bersih dan berkah (Syahrin, 1999:143-145) sedangkan secara *etimologi* zakat berarti menyerahkan atau mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan atau jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah *Ta'ala* untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimannya (*muzakki*) dengan persyaratan tertentu (Didin, 2003: 87).

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكَّيْتُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” QS. At-Taubah 103

Para ekonom Islam sependapat bahwa, zakat merupakan instrument pengaman sosial (*social security*), berarti bahwa pengelolaan zakat harus dapat mengatasi masalah sosial dan mengentaskan kemiskinan. Dan zakat sebagai salah satu sumber keuangan yang berdasarkan keadilan dan merupakan penyeimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pemilik harta atau biasa disebut dengan *muzakki* (Ahmad, 2017: 221).

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِمُوا

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. QS Al-Baqarah 43

Ibnul Arabi berkata: kata zakat biasanya digunakan untuk menyebut zakat yang wajib, akan tetapi kadang kala digunakan untuk menyebut zakat sunnah, nafkah, hak, dan memaafkan suatu kesalahan. (Fathul Bari, 3: 296).

b. Infak

Secara *etimologi* infak berasal dari bahasa Arab yaitu kata al-infaq yang berarti membelanjakan (Didiek, 2003: 48) secara *etimologi* infak berarti mengeluarkan harta untuk suatu kebaikan di jalan Allah (Didin, 2003: 86)

dalam istilah lain infak diartikan sebagai harta yang dibayarkan atau diberikan kepada pihak lain tanpa adanya unsur komersial (Dwi, 2010: 113) perbedaan infak dengan zakat adalah infak tidak mengenal *nisab* dan tidak harus menunggu sampai satu tahun kepemilikan harta sebagaimana persyaratan zakat (Abdul, 2010: 84).

Kata infak dalam dalil-dalil Al-Qur'an, hadits maupun dalam budaya lama memiliki makna yang cukup luas yaitu mencakup semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Qur'an surat Al-Furqon sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. QS Al-Furqon 67

c. Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata as-sadaqah, dalam *ensiklopedia* Islam diartikan sebagai suatu pemberian secara sukarela dan spontan tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu. Shodaqoh merupakan suatu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam, selain sebagai bentuk kepedulian terhadap

sesame, shodaqoh juga bernilai pahala disisi Allah *Ta'ala* dan mendapat keberkahan dalam hidup.

Dalam tinjauan ekonomi shodaqoh dapat diartikan sebagai subsidi silang antar pelaku rumah tangga. Shodaqoh sebagai suatu kebijakan yang dipitakan oleh pemilik kehidupan yaitu Allah *Ta'ala* dan ini merupakan solusi untuk manusia dalam menangani kesenjangan sosial dan ekonomi agar terwujudnya kesejahteraan sosial (Dwi, 2010: 244).

يَفْعَلُ نَوْمًا ۗ النَّاسُ بَيْنَ إِضْلَاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ مَنْ إِلَّا نَجَّوَاهُمْ مِنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَا ❁

عَظِيمًا أَجْرًا تُؤْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهُ مَرْضَاتٍ ابْتِغَاءَ ذَلِكَ

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. QS An-Nisa 114

Adapun urgensi dan hikmah zakat, infak, shodaqoh yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan seorang Muslim kepada Allah *Ta'ala* Tuhan semesta alam.
- 2) Sebagai wujud dari rasa syukur atas nikmat harta benda yang diberikan oleh Allah *Ta'ala*

- 3) Untuk meminimalisir sifat kikir, egois, *matrealistik* dan cinta kepada dunia secara berlebihan, atau disebut dengan sifat bakhil yaitu sifat yang dapat menjauhkan manusia dari rahmat Allah *Ta'ala*
- 4) Untuk membersihkan dan mensucikan harta serta memberikan efek ketenangan jiwa pada *muzakki*
- 5) Harta ZIS yang dikeluarkan oleh seorang Muslim akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemilik harta tersebut.
- 6) ZIS merupakan bentuk cinta dan kasih sayang seorang kepada sesamanya
- 7) Zakat yang dikelola dengan baik merupakan *instrument* pemerataan pendapat dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Didin, 2003: 87-89)

6. Pengukuran kinerja

Kinerja merupakan istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas

manajemen dan semacamnya. Pengukuran kinerja adalah proses mencatat mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplish*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses (Sutiyorini, 2002: 186).

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan, dan hasil dari pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan pengendalian (Yuwono, dkk, 2006: 23).

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Mulyadi (2001: 415) mendefinisikan tentang pengukuran kinerja sebagai penentu secara *periodic* efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka dari itu penilaian kinerja sesungguhnya adalah penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Setiap organisasi mengharapkan kinerja yang memberikan kontribusi untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai suatu institusi yang unggul di kelasnya. Keberhasilan perusahaan (*success factor*) digunakan sebagai pengukur keberhasilan personal, dengan demikian dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat digunakan menjadi

landasan untuk mendesain system penghargaan agar personal menghasilkan kinerjanya yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi.

Mardiasmo (2002: 7) menyebutkan elemen-elemen *akuntabilitas* sebagai alas pengukur kinerja organisasi pemerintah yaitu:

Meningkatkan efektivitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang diberikan harus tepat sasaran.

- a. Meningkatkan multi pelayanan public
- b. Menurunkan biaya pelayanan public karena hilangnya inefisiensi dan terjadi penghematan dalam penggunaan input.
- c. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.

7. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yaitu dituangkan dalam anggaran (Mulyadi, 2001: 416).

Menurut Lynch dan Cross dalam Sony Yuwono, dkk (2006: 29) tujuan diadakannya system pengukuran kinerja adalah:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang

dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.

- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan *internal*
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (*reduction of waste*).

Sesuai maksud dan tujuan tersebut diatas, dapat diketahui manfaat dari pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2002: 122):

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai monitor mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- c. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- d. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki.
- e. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

8. Pengukuran kinerja dengan system tradisional

Ukuran kinerja yang biasa digunakan dalam manajemen tradisional adalah ukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja ini mudah dilakukan sehingga kinerja personal yang diukur hanyalah yang berkaitan dengan keuangan saja. Pengukuran kinerja berbasis tolok ukur keuangan, membuat manajemen secara otomatis menginstalasi sistemnya dengan hasil tolok ukur, sehingga pengambilan keputusan organisasi dapat selaras dengan system pengukuran tersebut. Meskipun aspek keuangan merupakan sumber dari segala keputusan, tindakan, dan aktivitas manajemen di masa lalu, tetapi ukuran keuangan tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadikan perubahan kekayaan yang diciptakan oleh organisasi dan lebih memfokuskan pada pengarahan sumber daya organisasi untuk tujuan jangka pendek.

9. *Balanced scorecard*

Balanced scorecard merupakan kumpulan ukuran kinerja *terintegrasi* yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. *Balanced scorecard* memberikan suatu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada manajer-manajer diseluruh organisasi. *Balanced scorecard* juga menunjukkan bagaimana perusahaan menyempurnakan prestasi keuangannya (Tunggal, 2002:1).

Balanced scorecard adalah suatu system manajemen pengukuran dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan *komprehensif* dapat memberikan pemahaman kepada manajer mengenai *business performance* (Yuwono, dkk, 2002: 8)

Istilah *balanced scorecard* terdiri dari dua kata yaitu *balanced* (berimbang) dan *scorecard* (kartu skor). Kata berimbang (*balanced*) dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan non keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan bagian *internal* dan *eksternal*. Pengertian kartu skor hasil kinerja baik kondisi sekarang maupun untuk perencanaan di masa yang akan datang. Definisi tersebut pengertian sederhana dari *balanced scorecard* adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan *factor internal* dan *eksternal* (Mulyadi, 2001: 1)

10. Karakteristik *balanced scorecard*

Berdasarkan asumsi-asumsi mengenai pengukuran kinerja diatas, dapat diidentifikasi karakteristik yang membedakan *balanced scorecard* dengan pengukuran kinerja tradisional. Salah satu adalah keseimbangan antara ukuran-ukuran kinerja yang digunakan. Karakteristik lainnya adalah

mengenai keterkaitannya dengan strategi perusahaan kedalam perangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan system manajemen strategi (Kaplan dan Norton, 2000: 2).

Menurut Sudibyo (1997:39), sifat-sifat dan deskripsi yang menggambarkan bentuk, karakteristik, dan mekanisme *balanced scorecard* adalah:

- a. *Instrument* pengukuran kinerja manajemen yang *multidimensional*. *Balanced scorecard* mengukur kinerja manajemen tidak dari aspek *financial* saja tetapi memberikan *indicator* lain seperti kepuasan konsumen retensi konsumen waktu pelayanan (*delivery time*) kepuasan kerja, tingkat penguasaan *skill* segmen pasar.
- b. *Akomodatif* terhadap kepentingan banyak kelompok (*stakeholders*). *Balanced scorecard* tidak seperti akuntansi konvensional yang mengambil sudut pandang pemilik pada *proprietary concept* pada *entety concept*, namun *balanced scorecard* mengakomodasikan sudut pandang semua kelompok *stakeholders*.
- c. Berorientasi pada implementasi misi dan strategi. *Balanced scorecard* mendorong dan memaksa manajemen menjabarkan visi, misi dan strategi kemudian ditentukan ukuran-ukuran keberhasilannya (*strategi outcome measures*) sebagai *lagging indicators* dari kinerja perusahaan.
- d. Memberikan *lagging* dan *leading indicators* kinerja sukses. *Balanced scorecard* merupakan *indicator* tingkat pencapaian suatu sasaran yang

dimensi waktunya mengarah ke masa lalu (*lagging indicators*), dan *leading indicators* yang mempengaruhi factor-faktor kunci kinerja masa depan.

- e. *Strategic business unit (SBU)*. *Balanced scorecard* terdiri dari ukuran-ukuran kinerja yang satu sama lain dihubungkan secara logic oleh hubungan sebab-akibat yang jelas membentuk satu kesatuan pemikiran yang cenderung dan *komprehensif* tentang *operasionalisasi* misi dan startegi.

Balanced scorecard membantu manajemen mengartikulasikan strategi perusahaan dengan memberi kerangka kerja untuk menghasilkan berbagai proses manajemen penting (Kaplan dan Norton, 2002: 2), yaitu :

- 1) Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi.
- 2) Mengkomunikasikan dan mengkaitkan tujuan dan ukuran strategis.
- 3) Merencanakan, menetapkan, sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.
- 4) Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis.

Karakteristik *balanced scorecard* yang menjelaskan visi dan strategi ke dalam empat perspektif (perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan) yang saling berhubungan.

11. Keunggulan *balanced scorecard* dibandingkan dengan metode pengukuran yang lainnya.

Balanced scorecard dalam perkembangannya bukan hanya sekedar suatu instrument pengukuran kinerja, namun bisa digunakan sebagai kerangka (*framework*) sentral yang terfokus pada misi dan strategi dalam melaksanakan berbagai proses manajemen penting seperti perencanaan dan penganggaran alokasi sumber daya, pemberian kompensasi, pemberdayaan karyawan, pengadaan umpan balik strategi, dll. *Balanced scorecard* juga merupakan bagian dari pendekatan-pendekatan baru dalam era informasi (Sudibyo, 1997: 43).

Keunggulan *balanced scorecard* dalam konsep pengukuran kerja adalah mampu menggambarkan kinerja sebagai berikut:

- a. Komprehensi. *Balanced scorecard* memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan yang strategik dari yang sebelumnya hanya terbatas pada prespektif keuangan meluas ketiga perspektif lainnya yaitu pelanggan proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan.
- b. Koheren. *Balanced scorecard* mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab-akibat (*causal relationship*) diantara berbagai sasaran yang strategik yang ditetapkan dalam perspektif *non-finansial*

(pelanggan proses bisnis internal dan pemberlajaran pertumbuhan) harus memiliki hubungan *kausal* dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara definisi sasaran strategik adalah keadaan/kondisi yang akan datang yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan sasaran strategik yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif baru dapat dijelaskan hubungan sebab akibatnya.

- c. Seimbang. Keseimbangan sasaran strategic yang dihasilkan dalam empat perspektif meliputi jangka pendek dan jangka panjang yang berfokus pada factor internal dan eksternal penting untuk menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang. Keseimbangan *balanced scorecard* juga tercermin selarasnya perusahaan sehingga setiap personal yang ada di dalam perusahaan bertanggungjawab untuk memajukan perusahaan.
- d. Terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya keyakinan bahwa “*if we can measure it, we can manage it, if we can manage it, we can achieve it*”. Keterukuran system strategis yang dihasilkan oleh system perencanaan strategic menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh system tersebut (Mulyadi, 2001: 18)